



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id

Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini, Kamis, 7 Mei 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzy Marasabessy, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si.
Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
Instansi : Kementerian Hukum
selanjutnya sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II.

Menyatakan bahwa:

1. berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-457/HK.01/SJN.H/2026 tanggal 30 April 2026 hal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara;
2. substansi Rancangan Peraturan Menteri dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2 di atas, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

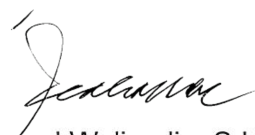
Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 7 Mei 2026

Pemrakarsa,


(Fauzy Marasabessy)

Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan II,


(Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si.)